

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa agar setiap tahap semakin mendekati tujuan. Masalah besar yang dihadapi dalam pembangunan di Indonesia yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan primer.

Kemiskinan menurut World Bank (2000) adalah kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*) yang membatasi kesejahteraan individu. Melihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini tidak memberikan kontribusi besar dalam menurunkan persentase kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan pun digalakkan hampir diseluruh negara-negara di dunia, khususnya di negara berkembang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah lama berkomitmen untuk memerangi kemiskinan di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Salah satu cara terpenting yang diadopsi oleh PBB untuk mengatasi masalah ini adalah melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan pertama dari SDGs secara khusus berfokus pada penghapusan kemiskinan dalam semua bentuknya di seluruh dunia. PBB bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa sumber

daya dialokasikan dengan benar dan intervensi yang efektif diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini

Proyek *Poverty Eradication* ini dicetuskan oleh PBB dengan landasan hak asasi manusia, bahwa kemiskinan bukanlah hal yang manusiawi. Hak untuk hidup nyaman dan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari merupakan hak manusia yang tidak pernah lepas semenjak mereka lahir. Dari definisi kata kemiskinan, tidak hanya mencakup kurangnya pendapatan; kata kemiskinan juga mencakup hal lainnya seperti kelaparan dan kurang gizi, akses pendidikan yang terbatas, diskriminasi dan pengucilan sosial serta kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Atas dasar inilah PBB mencetuskan agenda *Poverty Eradication* untuk mengeluarkan masyarakat dari (garis) kemiskinan dan juga mencegah dampak buruk lainnya dari faktor kemiskinan tersebut.

Masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Jika dilihat dari segi ekonomi penyebab kemiskinan seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan dapat menimbulkan masalah lain seperti kelaparan, masalah kesehatan, kriminalitas, dan sanitasi.

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang menjadi kutub pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dapat diketahui bahwa perkembangan ekonomi merupakan indikator yang lazim digunakan oleh suatu provinsi untuk melihat kemajuan atau kemampuan provinsinya. Sektor industri pengolahan di Jawa Timur memiliki peran yang penting dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan

ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, sektor manufaktur terutama segmen besar dan menengah cukup tinggi kontribusinya terhadap ekonomi Jawa Timur.

Selain memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan sektor industri di Provinsi Jawa Timur juga memiliki kinerja yang cukup baik. Jawa Timur dapat dikatakan telah mencapai fase industrialisasi. Fase industrialisasi dapat ditandai dengan besarnya dominasi sektor industri dalam aktivitas ekonom.

Adapun demikian, meskipun aktivitas industri di Jawa Timur tumbuh dengan pesat, nampaknya kemiskinan masih menjadi masalah yang belum terpecahkan di Jawa Timur Berdasarkan fakta bahwa aktivitas industri Jawa Timur cukup tinggi namun penurunan kemiskinan masih berjalan lambat, Adapun faktor lain yang menjadi alasan utama kemiskinan menjadi topik hangat di Jawa Timur yaitu dapat dilihat dari standar kualitas hidup atau Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam konteks pembangunan ekonomi di suatu daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah. Hal ini menandakan bahwa IPM menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan dan pembangunan yang terarah. IPM yang merupakan tolak ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah (Sayifullah & Ratu Gandasari, 2016).

Tabel 1.1 Capaian Tingkat IPM 5 Provinsi di Pulau Jawa tahun 10 Tahun Terakhir

PROVINSI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DKI JAKARTA	77,53	78,08	78,39	78,99	79,6	80,06	80,47	80,76	80,77	81,11
JAWA BARAT	67,32	68,25	68,8	69,5	70,05	70,69	71,3	72,03	72,09	72,45
JAWA TENGAH	67,21	68,02	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16
DI YOGYAKARTA	76,15	76,44	76,81	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22
JAWA TIMUR	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27	70,77	71,5	71,71	72,14
BANTEN	68,92	69,47	69,89	70,27	70,96	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72

Sumber : (Badan Pusat Statistik BPS, 2021)

Berdasarkan tabel diatas, Provinsi Jawa Timur terlihat memiliki tingkat IPM terendah dari 5 Provinsi lainnya di pulau jawa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indeks pembangunan manusia (IPM) dibentuk melalui 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: (1). umur panjang dan sehat, (2). pengetahuan, (3). standar hidup layak. Indeks pembangunan manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan ekonomi dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan yang layak (BPS Jawa Timur, 2017). Komponen pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM) meliputi: angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata- rata lama sekolah, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Oleh karena itu, apabila Jawa Timur berada di perlu ditelaah lebih lanjut kondisi seperti ini agar Jawa Timur dapat bersaing dengan provinsi lain di pulau Jawa.

Keberhasilan pemerintah dalam mengatasi dapat dilihat juga dari sejauh mana pemerintah dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan lapangan kerja, agar tenaga kerja dapat terserap dengan baik harus diiringi dengan lapangan kerja yang baru, dampak dari adanya lapangan kerja yang baru akan dapat menyebabkan meningkatnya daya beli serta pendapatan sehingga dapat

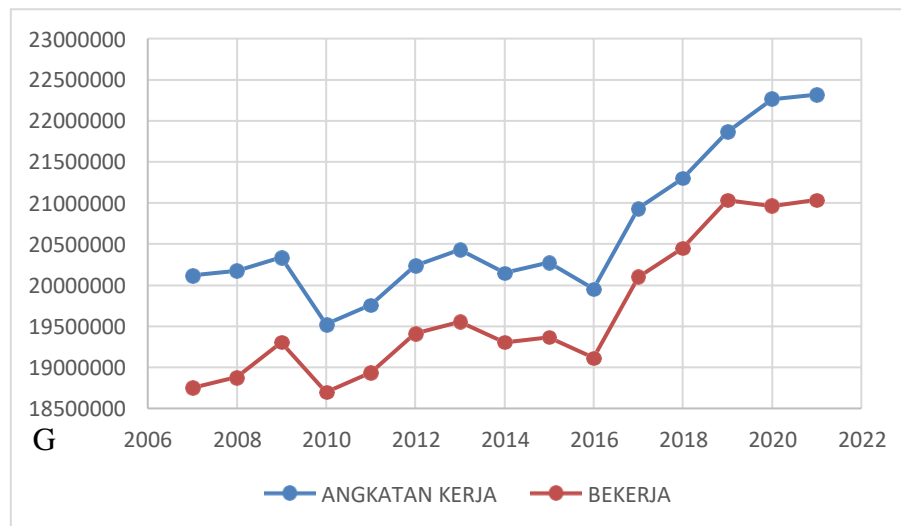
meningkatkan kemakmuran masyarakat yang semakin tinggi. Besarnya jumlah penduduk mengakibatkan angkatan kerja semakin membludak sehingga jumlah pencari kerja dan menganggur akan semakin banyak yang mengakibatkan pendapatannya relatif rendah. Jika perekonomian suatu daerah tinggi, maka akan tercipta pasar tenaga kerja yang tinggi pula.

Dalam model equilibrium (keseimbangan) pasar tenaga kerja, upah riil berubah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tetapi selama ini upah tidak selamanya fleksibel dengan perkembangan baik dari permintaan dan penawaran itu sendiri, bisa juga terjadi upah riil tertahan di atas tingkat equilibrium yang dikenal dengan dengan kekakuan upah (*wage rigidity*). Kekakuan upah ini akan menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Menurut (Mankiw, 2012) rendahnya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh kekakuan upah akibat penyesuaian antara jumlah pekerja yang menginginkan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia.

Kepadatan penduduk di Jawa Timur cukup besar yang menyebabkan laju pertumbuhannya tinggi tetapi lapangan kesempatan kerjanya terbatas. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan maksimal agar permasalahan ketenagakerjaan cepat terselesaikan. Akan tetapi, perlu juga disadari kenyataan yang ada bahwa kesempatan kerja tidak selalu terjelma menjadi penyerapan tenaga kerja dan tenaga kerja yang terserap bisa memiliki pekerjaan lebih dari satu.

Berikut digambarkan dalam grafik kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur periode 2007 – 2021 :

Gambar 1.1 Grafik Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Jawa Timur 2006- 2021



Sumber: Penulis

Grafik proyek diatas memperlihatkan kondisi umum ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur yang mengalami fluktuasi. Tingginya peningkatan jumlah angkatan kerja menjadi masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Jawa Timur karena tidak dibarengi dengan tingginya tenaga kerja yang terserap. Provinsi Jawa Timur harus segera meningkatkan perluasan kesempatan kerja karena pertumbuhan jumlah angkatan kerja terus meningkat.

Banyaknya kesempatan kerja yang tersedia di lapangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemakmuran suatu masyarakat yang meningkat. Guna mendorong transformasi perekonomian daerah menuju perekonomian yang seimbang diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mendorong dan merangsang pembangunan daerah lain dan kekuatan pembangunan utama bagi ditingkatkannya pendapatan masyarakat

dan ketimpangan sosial ekonomi bisa diatasi.

Penyerapan tenaga kerja serta tingkat upah dapat ditingkatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pesatnya permintaan tenaga kerja (Priambodo et al., 2015). Pertumbuhan Ekonomi dan kemiskinan memiliki suatu keterkaitan yang kuat dan saling berhubungan, PDRB yang tumbuh memiliki peran yang penting dalam mengatasi kemiskinan ketika pertumbuhan tersebut terjadi secara merata (*growth with equity*). Capaian pertumbuhan perekonomian provinsi Jawa Timur saat ini lebih tinggi dibanding tahun 2020, yang sempat mengalami kontraksi sedalam 2,33%. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan masih menjadi penopang terbesar perekonomian Jawa Timur, yakni dengan kontribusi sebesar 30,72% pada 2021. Diikuti sektor perdagangan besar dan eceran 18,46%, serta sektor pertanian sebesar 11,5%. Diharapkan pemerintah dapat mengupayakan dalam pencarian solusi maupun upaya dalam mempertahankan strategi secara berkesinambungan agar peningkatan pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik membahas tentang permasalahan kemiskinan di Jawa Timur yang bisa dibilang masih cukup tinggi. Beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu dari rendahnya IPM di provinsi Jawa Timur dari 5 provinsi di pulau Jawa lainnya, Ketidakseimbangan Penyerapan Tenaga Kerja dengan jumlah Angkatan kerja yang tersedia, dan Pertumbuhan Ekonomi di Jatim yang meskipun aktivitas industri di Jawa Timur tumbuh dengan pesat namun belum bisa mengatasi masalah kemiskinan. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengambil judul **“Analisis Indeks Pembangunan Manusia, Penyerapan Tenaga Kerja, dan**

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Jawa Timur”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Apakah ada pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2007-2021?

1.2.2. Apakah ada pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2007-2021?

1.2.3. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2007-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh IPM (Indeks pembangunan manusia) terhadap kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2007-2021

1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2007-2021

1.3.3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2007-2021

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada kemiskinan di Jawa Timur. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan IPM (Indeks pembangunan manusia), penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun

2007-2021. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data dari BPS Jawa Timur. Data dianalisis dengan program SPSS dengan analisis regresi linier berganda.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan teori-teori ekonomi berkenaan dengan faktor- faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Selain itu, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang berkaitan dengan kemiskinan di Jawa Timur ataupun sebagai informasi dan bahan kajian ilmiah bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan permasalahan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Serta menjadi media pembelajaran secara nyata bagi penulis karena dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan.

1.5.3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat memberikan arahan kebijakan bagi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.